

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Review

Pada dasarnya dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian- penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan ini. Adapun literatur tersebut diantaranya:

Literatur dengan judul *Tiongkok-Cambodia Investment* yang ditulis oleh Antonio Graceffo memberikan gambaran mengenai investasi luar negeri dan bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja. Dalam tulisannya Graceffo membahas bagaimana awal terjalin hubungan antara Tiongkok dan Kamboja sampai dengan sekarang. Graceffo juga menyebutkan bahwa Tiongkok telah menjadi salah satu negara penyumbang dana investasi terbesar di Kamboja. Dana investasi yang disumbang oleh Tiongkok bukan hanya dalam investasi padat modal akan tetapi juga dalam padat karya. Selain itu, Graceffo menyebutkan banyak proyek-proyek infrastruktur di Kamboja yang dikerjakan oleh Tiongkok salah satunya pembangunan stadion olimpiik yang baru untuk digunakan pada *SEA Games 2023*(Graceffo, 2013). Graceffo juga membahas mengenai alasan banyaknya investor Tiongkok yang berinvestasi di Kamboja. Kamboja dinilai mempunyai nilai lebih dan menarik minat para investor Tiongkok misal, Kamboja yang menggunakan dollar AS dan banyak dari investor Tiongkok yang lebih memilih menyimpan kekayaannya dalam bentuk dollar AS.

Literatur lainnya dalam memahami hubungan antara Tiongkok dengan Kamboja penulis mengacu pada *working paper* yang ditulis oleh John D. Ciorciari

dengan judul *Tiongkok and Cambodia: Patron and Client?*. Dalam tulisannya, Ciorciari menjelaskan bahwa Kamboja telah menjadi partner terdekat dari Tiongkok dan sekutu diplomatik. Hal ini terlihat dari dukungan Kamboja terhadap Tiongkok dalam pembicaraan mengenai Laut Tiongkok Selatan yang menimbulkan berbagai kritik yang menggambarkan Kamboja sebagai klien dari Tiongkok. Ciorciari juga menjelaskan sejauh mana hubungan patron dan klien antara Tiongkok dan Kamboja dan bagaimana manfaat pertukaran yang asimetris antara kedua belah pihak yang biasanya termasuk dukungan material dan perlindungan dari negara yang lebih kuat dan tingkat hormat dan dukungan politik dari mitra yang lebih lemah.

Perbedaan ini yang mengurangi otonomi negara yang lebih lemah dan sering menimbulkan reaksi politik yang membuat pemerintah enggan menerima status negara klien. Ciorciari berpendapat dalam tulisannya bahwa hubungan Tiongkok-Kamboja telah menguat terutama karena Tiongkok telah memberikan penawaran-penawaran kepada elit pemerintah, memberikan manfaat ekonomi dan politik yang luas tanpa menuntut bentuk-bentuk kesetiaan politik yang mahal sebagai imbalannya. Itu sudah mulai berubah, namun elit Kamboja menjadi lebih tergantung pada Tiongkok, lebih terikat pada preferensi kebijakan Beijing, dan lebih dekat diidentifikasi dengan Tiongkok oleh para kritikus baik didalam dan luar negeri. Dengan demikian hubungan tersebut telah mengambil karakter dari patron-klien yang semakin meningkat, membuat Kamboja menghadapi risiko penurunan yang melekat dalam pengaturan semacam itu dan menambah buruk bagi masa depan Kamboja jika tren saat ini terus berlanjut.

Selain tulisan dari Ciorciari adapula tulisan dari Chandra Khun yang juga menggambarkan bagaimana hubungan antara Tiongkok dan Kamboja dalam tulisan yang berjudul *Cambodia-Tiongkok Based on the Mutually Beneficial Interests: Tiongkok, the 'Most Trusted Friend' beyond Doubt*. Dalam tulisannya Khun menjelaskan tentang bagaimana kompleksnya hubungan antara Tiongkok dengan Kamboja bahkan jauh sebelum seperti sekarang. Namun Khun lebih berfokus pada hubungan Tiongkok dan Kamboja pada masa perang dingin dan pasca perang dingin serta bagaimana kedua negara ini dapat mencapai satu sama lain dan menjadi mitra strategis di Asia Tenggara baik dalam faktor ekonomi dan karakteristik strategis. Tulisan Khun ini membahas bagaimana hubungan bilateral ini mungkin dapat berimplikasi pada politik domestik di Kamboja. Dalam perspektif Kamboja, Khun berpendapat bahwa hubungan saat ini memungkinkan untuk memperlebar ketidaksamarataan ekonomi dan memperburuk situasi Hak Asasi Manusia di Kamboja. Maka dari itu, konsekuensi ini akan memiliki efek domino bagi hubungan kedua belah pihak pada masa mendatang akibat dari penolakan kepentingan strategis dari pemerintahan Kamboja, terutama dari pasca pemilihan umum pada 2013. Tulisan dari Ciorciari dan Khun tersebut dijadikan sebagai acuan oleh penulis dalam melihat bagaimana hubungan yang terjadi antara Kamboja dan Tiongkok. Hubungan antara Kamboja dan Tiongkok yang dipaparkan baik oleh Ciorciari ataupun Khun memiliki kesamaan sudut pandang dimana keduanya sama-sama melihat hubungan yang terjadi cenderung bersifat ketergantungan. Ciorciari dengan pandangan bahwa hubungan yang dibangun lebih seperti patron dengan klien yang dimana dalam hal ini Kamboja sebagai 'klien' dari Tiongkok. Lalu, pandangan Khun dimana hubungan antara kedua negara yang terjalin sangat lama dan menguat

pada pasca perang dingin, Khun juga memfokuskan tulisannya pada bagaimana hubungan erat antar kedua negara dapat mempengaruhi keadaan politik dalam negeri dari Kamboja.

2.2. Kerangka Teori

Dalam melihat proses interaksi antar negara pada dasarnya studi Hubungan Internasional membaginya kedalam tiga pandangan yaitu Thomas Hobbes, Immanuel Kant, dan Hugo de Groot. Pandangan dari Thomas Hobbes menekankan interaksi antar negara yang bersifat saling meniadakan atau yang lebih dikenal dengan *zero sum game* dan juga memandang hubungan internasional antar negara bersifat konfliktual mengingat sifat negara yang mementingkan kepentingan nasional diatas segalanya. Pandangan Immanuel Kant berpendapat bahwa hubungan internasional bersumber dari adanya masyarakat dunia yang saling terhubung dan membentuk komunitas global yang saling tergantung dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa negara-negara di dunia memiliki intensif untuk melakukan kerjasama. Pandangan dari Hugo de Groot mengemukakan bahwa hubungan antar masyarakat internasional tidak sepenuhnya anarki atau harmonis. Namun secara sadar mengakui adanya kepentingan dan nilai tertentu yang memiliki kesamaan satu sama lain, sehingga masyarakat internasional mampu membentuk pola hubungan yang teratur dan memiliki pola interaksi yang sama sebagai bentuk penerimaan atas adanya aturan main. Pandangan Groot juga menekankan adanya kerjasama dalam hubungan antar negara dan mengakui peran penting yang dimiliki negara sebagai aktor dalam hubungan internasional (Tarzi, 1998).

Perspektif neoliberalisme muncul sebagai satu perspektif yang memfokuskan diri pada cara-cara kerjasama internasional baik melalui organisasi

internasional, *state actor* ataupun *non-state actor*. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara didunia (Bagaskara, 2018). Kerjasama internasional yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara (Bagaskara,2018). Menurut KJ. Holsti kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilainilainya.
- c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Arif Budiman (2000) mendefinisikan pembangunan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi Todaro (Warjio: 2016) mendefinisikan pembangunan sebagai sebagai suatu proses perubahan sosial.

“Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi, pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan materiel (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan, dan kualitas yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka”

Pembangunan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat mekanisme ekonomi. Todaro dalam Teori Pembangunan Dunia ke-Tiga (Arif Budiman:2000) menyatakan;

“Ekonomi pembangunan berurusan dengan mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, untuk menciptakan perbaikan-perbaikan yang luas dan cepat dalam taraf kehidupan masyarakat miskin yang kekurangan makan dan buta huruf... Ekonomi pembangunan dengan demikian berurusan dengan perubahan structural dan institusional yang cepat dan meliputi seluruh masyarakat, supaya hasil-hasil pembangunan bisa dilaksanakan dengan cara yang paling efisien untuk dibagikan kepada rakyat banyak”

Pembangunan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat mekanisme ekonomi. Todaro dalam Teori Pembangunan Dunia ke-Tiga (Arif Budiman:2000) menyatakan;

“Ekonomi pembangunan berurusan dengan mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, untuk menciptakan perbaikan-perbaikan yang luas dan cepat dalam taraf kehidupan masyarakat miskin yang kekurangan makan dan buta huruf... Ekonomi pembangunan dengan demikian berurusan dengan perubahan structural dan institusional yang cepat dan meliputi seluruh masyarakat, supaya hasil-hasil pembangunan bisa dilaksanakan dengan cara yang paling efisien untuk dibagikan kepada rakyat banyak”

Robert Gilpin juga dalam bukunya *Political Economy of International Relation* mengatakan pentingnya regulasi yang mengatur hubungan kerja sama dengan negara lain atau aktor *non-state* agar mendapat hasil maksimal dalam kegiatan ekonomi.

“...namun terlepas dari pentingnya aktor-aktor lain (World Bank, IMF, dan Bank Sentral Eropa) saya menekankan bahwa pemerintah pusat masih membuat keputusan utama mengenai masalah ekonomi. Mereka terus menetapkan aturan dengan aktor lain, dan menggunakan power yang cukup besar untuk dapat mempengaruhi aktor lain sehingga mendapatkan keuntungan yang besar dalam kegiatan ekonomi”

Kamboja memiliki *The Rectangular Strategy* yang menjadi pedoman untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan pendapat Sadono Sukirno (2006) soal pertumbuhan ekonomi:

“Pembangunan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan, artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada satu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lainnya yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, dan peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia.”

Pentingnya modal yang didapat dari investasi demi mendukung pembangunan juga dipaparkan oleh Rahmi Jened (2016), sebagai berikut:

“...investasi langsung memiliki kontribusi, khususnya di negara berkembang. Investasi dari negara maju dengan fungsi produksinya yang superior sebagai “tutor” bagi negara berkembang dengan fungsi produksinya yang masih inferior melalui transfer teknologi (*transfer of technology*), keahlian manajemen pemasaran (*managerial and market skill*), informasi pasar (*market information*), pengalaman organisasi (*organizational experience*), inovasi dalam teknik proses produksi dan produknya (*innovation on products and production techniques*), dan pelatihan kerja (*training of workers*).”

Bob S. Hadiwinata (2006) menyampaikan pentingnya kebijakan industrial yang dapat mempermudah masuknya *Foreign Direct Investment* ke dalam negeri.

“Kebijakan *catching-up* (mengejar ketertinggalan) ditempuh oleh negara-negara yang lazim dikenal dengan sebutan *New Industrializing Country* (NICs) dengan cara mendorong negara untuk berperan secara aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif... Negara menghilangkan hambatan-hambatan sistemik (birokrasi berlebihan, peraturan perpajakan yang rumit, infrastruktur yang kurang memadai) serta memberikan berbagai kemudahan bagi sektor industri (insentif pajak, peraturan ekspor-impor yang lebih sederhana, pembenahan fasilitas infrastruktur) untuk mencegah distorsi serta memacu proses industrialisasi di dalam negeri.

*The Rectangular Strategy*¹ (*The Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity, and Efficiency in Cambodia*) adalah kekuatan utama pembangunan nasional di Kamboja yang telah dimulai dari tahun 1998 dan terus berlanjut hingga saat ini dalam empat fase yang masing-masing sejajar dengan masa jabatan Legislatif Dewan Nasional yaitu lima tahun (Sotharith & Sotheara, 2019).

RS memilih elemen-elemen kunci dari *Millennium Development Goals*², *the Cambodia Socio-Economic Development Program* tahun 2001-2005 (SEDP2), *the Cambodia National Poverty Reduction Strategy* tahun 2003-2005 (NPRS) dan berbagai kebijakan, strategi, rencana, dan program reformasi penting lainnya, yang

¹ Selanjutnya disebut RS.

² Selanjutnya disebut MDG.

semuanya telah dirumuskan melalui konsultasi luas dengan semua pemangku kepentingan nasional dan internasional termasuk kementerian dan lembaga pemerintah, perwakilan masyarakat sipil, dan komunitas donor (Royal Government Of Cambodia, 2018).

Agenda komprehensif yang dihasilkan pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan dan membangun kapasitas lembaga-lembaga publik, memperkuat tata pemerintahan yang baik, dan memodernisasi infrastruktur ekonomi nasional, dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi, menghasilkan lapangan kerja untuk semua warga negara, memastikan kesetaraan sosial, meningkatkan efisiensi sektor publik, dan melindungi sumber daya alam dan warisan budaya bangsa hal ini sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan (Royal Government Of Cambodia, 2018).

RS adalah struktur terintegrasi dari persegi panjang yang saling terkait, sebagai berikut:

Pertama, inti dari RS adalah Good Governance berfokus pada empat bidang reformasi:

- 1) Anti-korupsi,
- 2) Reformasi hukum dan peradilan,
- 3) Reformasi administrasi publik termasuk desentralisasi dan dekonsentrasi, dan,
- 4) Reformasi angkatan bersenjata, terutama demobilisasi.

Kedua, lingkungan untuk implementasi RS terdiri dari empat elemen:

- 1) Perdamaian, stabilitas politik, dan tatanan sosial;

- 2) Kemitraan dalam pembangunan dengan semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, komunitas donor, dan masyarakat sipil;
- 3) Lingkungan ekonomi makro dan keuangan yang menguntungkan; dan
- 4) Integrasi Kamboja kedalam kawasan dan dunia.

Ketiga, empat strategi “*growth rectangles*” adalah

- 1) Peningkatan sektor pertanian;
- 2) Pertumbuhan dan lapangan kerja sektor swasta;
- 3) Rehabilitas berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur fisik; dan
- 4) Pembangunan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia.

Keempat, setiap strategi “ *growth rectangles* “ atau pertumbuhan persegi panjang memiliki empat sisi:

- *rectangles* pertama: Peningkatan Sektor Pertanian mencakup:
 - 1) Peningkatan produktivitas dan diversifikasi pertanian;
 - 2) Reformasi pertanahan dan pembukaan tambang;
 - 3) Reformasi perikanan; dan
 - 4) Reformasi kehutanan;
- *rectangles* kedua: Rehabilitasi dan Konstruksi Infrastruktur Fisik Lanjutan, yang melibatkan:

- 1) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur transportasi lanjutan (transportasi darat, laut, dan udara);
 - 2) Pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
 - 3) Pengembangan energi dan jaringan listrik, dan
 - 4) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- *rectangels* ketiga: Pertumbuhan dan Pekerjaan Sektor Swasta mencakup:
 - 1) Memperkuat sektor swasta dan daya tarik investasi;
 - 2) Promosi pengembangan UKM;
 - 3) Penciptaan pekerjaan dan memastikan peningkatan kondisi kerja; dan
 - 4) Pembentukan jaring pengaman sosial untuk pegawai negeri sipil, karyawan, dan pekerja; dan
 - *rectangels* keempat: Pengembangan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, termasuk:
 - 1) Peningkatan kualitas pendidikan;
 - 2) Peningkatan layanan kesehatan;
 - 3) Membina kesetaraan gender, dan
 - 4) Implementasi kebijakan kependudukan yang cocok.

Dalam penerapan dari fase-fase RS Pemerintah Kamboja mengeluarkan NSDP sebagai rancangan strategi pembangunan dengan jangka waktu lima tahun. Dalam penerapan dari fase pertama pemerintah Kamboja mengeluarkan NSDP pada tahun 2006-2010. RS fase pertama disusun demi mendukung *the Third Legislature of the National Assembly* yang bertujuan untuk:

- mempromosikan pertumbuhan ekonomi Kamboja;

- menciptakan lapangan pekerjaan untuk seluruh pekerja Kamboja;
- mengimplementasi rencana aksi tata kelola yang dengan demikian
- memastikan keadilan sosial, peningkatan efisiensi dan efektifitas pemerintahan Kamboja; juga
- mempercepat implementasi dari reformasi secara luas diberbagai sektor untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pada fase pertama ini Kamboja telah mencapai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas makroekonomi, peningkatan dalam investasi, dan aliran masuk yang substansial dari FDI(Hun Sen, 2004).

Dalam fase kedua ini pemerintahan Kamboja melalui *the Fourth Legislature of the National Assembly* memprioritaskan tujuan untuk dicapai melalui NSDP Update untuk tahun 2009-2013 yaitu:

- keberlanjutan, perdamaian, stabilitas politik, keamanan dan tatanan sosial untuk mempromosikan supremasi hukum serta melindungi hak asasi manusia juga martabat dan demokrasi multipartai;
- pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan pada tingkat 7% per tahun dengan basis yang lebih luas dan kapasitas yang lebih kompetitif dalam konteks inflasi satu digit;
- mengurangi kemiskinan pada tingkat 1% per tahun dan peningkatan indikator sosial utama seperti pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender; dan meningkatkan jangkauan, efektifitas, kualitas dan kredibilitas dari layanan publik(Hun Sen, 2008).

Pada fase kedua ini Kamboja menghadapi tiga macam permasalahan yaitu keluar dari perlambatan ekonomi global; mempertahankan dan memperdalam proses

pertumbuhan; dan mentransformasikan ekonomi untuk bergerak menuju stabilitas keuangan yang lebih tinggi. Sebagai tambahan Kamboja juga dalam tugas mencapai MDG Kamboja. Hal ini telah membuat kemajuan yang signifikan pada banyak isu-isu yang terjadi, meskipun masih ada banyak yang belum tercapai.

Di antara isu-isu yang beredar Kamboja telah mencapai sebagian besar tujuan dari fase kedua RS yaitu untuk lebih mengkonsolidasi pertumbuhan ekonomi Kamboja, mendiversifikasi ekonomi, meningkatkan basis sumber daya manusia, lebih lanjut mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan berhasil mengintegrasikan ekonomi Kamboja ke dalam ASEAN.

Dalam fase ketiga dari RS yang diimplementasikan pada NSDP tahun 2014-2018 yaitu:

- memastikan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7%. Pertumbuhan ini sebaiknya berkelanjutan, inklusif, adil, dan tahan terhadap guncangan, melalui diversifikasi basis ekonomi untuk mencapai struktur yang lebih luas dan kompetitif, dengan inflasi yang rendah dan terkendali, nilai tukar yang lebih stabil dan pertumbuhan cadangan internasional yang stabil;
- membuat lebih banyak lapangan pekerjaan, khususnya bagi kaum muda, melalui peningkatan lebih lanjut dalam daya saing Kamboja untuk menarik dan mendorong baik investasi dalam dan luar negeri; mencapai lebih dari satu persen poin penurunan pada tingkat kemiskinan tahunan, termasuk mewujudkan MDG Kamboja sementara menempatkan prioritas tinggi pada sumber daya manusia, manajemen berkelanjutan, penggunaan lingkungan dan sumber daya alam;

- meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemerintahan baik pada level nasional dan sub-nasional dan memastikan efektifitas dan efisiensi layanan publik untuk melayani masyarakat dengan lebih baik (Royal Government Of Cambodia, 2018).

Kamboja telah merasakan rata-rata 7% pertumbuhan ekonomi per tahun hampir selama dua dekade. Atas capaian ini Kamboja telah berubah dari negara berpenghasilan rendah menjadi negara berpenghasilan menengah. Sektor agrikultural yang menjadi salah satu sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi Kamboja meningkat berkat dari kondisi iklim yang baik pada tahun 2016. Walaupun harga minyak dunia tetap tinggi akan tingkat daya beli masyarakat tetap tinggi dan FDI tetap sehat karena arus masuknya telah berkontribusi pada peningkatan cadangan internasional bruto.

Dalam *Cambodia Investment Guidebook* pada tahun 2013 dimuat bahwa baik peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terhadap FDI pada dasarnya demi mendorong terciptanya investasi. Sebagai Undang-undang tentang Investasi ditetapkan, dimuat dalam *Law on the Investment of the Kingdom of Cambodia Chapter IV: Investment Guarantees Article 8:*

“Investor akan diperlakukan dengan cara yang tidak diskriminatif sebagaimana diatur oleh hukum, kecuali untuk kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Konstitusi Kerajaan Kamboja”.

Para investor juga diijinkan untuk berinvestasi secara bebas dibanyak daerah. Berdasarkan Undang-undang tentang Invetasi, para investor akan mendapat berbagai insentif jika memiliki Sertifikat Pendaftaran Akhir.

Dilansir dalam *Cambodia Investment Guide*, Sistem hukum Kamboja sedang dalam tahap pengembangan berkelanjutan, dengan Undang-undang baru ditetapkan secara teratur untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan investor asing dan lokal. Selain itu, kementerian dan pejabat pemerintahan Kamboja mengeluarkan peraturan baru dan sekaligus pedoman pelaksanaan investasi dari waktu ke waktu. Dalam upaya untuk lebih meningkatkan potensi investasi negara itu, *the Council for the Development Cambodia* (CDC) bekerja sama dengan *the Supreme National Economic Council* (SNEC) telah mengambil langkah-langkah untuk meluncurkan *the Cambodia Industrial Development Policy 2015-2025* (IDP) pada agustus 2015. IDP menetapkan langkah-langkah kebijakan utama, yaitu promosi iklim investasi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (SEZs). IDP mengacu pada partisipasi sektor swasta, industri kompetitif, dan pembangunan sosial-ekonomi sebagai pilar mendasar dalam membuat Kamboja menjadi tujuan investasi yang lebih menarik.

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan lingkungan investasi pemerintah Kamboja telah mengambil langkah-langkah untuk merevisi undang-undang dan peraturan investasi saat ini, termasuk pembentukan undang-undang tentang zona ekonomi khusus (SEZs). Dalam *Cambodia Investment Guide* revisi tersebut yaitu:

a. Undang-undang Investasi

Undang-undang investasi yang diadopsi pada tahun 1994 sedang ditinjau ulang dengan tujuan untuk mengakomodasi komitmen regional yang telah dibuat Kamboja dan menjadikan Kamboja tujuan Investasi yang lebih menarik dalam hal :

- Memberikan insentif tambahan untuk proyek investasi yang berkontribusi pada pelatihan keterampilan, penelitian dan pengembangan, dan inovasi;
- Membina pertumbuhan usaha kecil dan menengah (“UKM”) dengan memberikan dukungan kepada UKM melalui pelatihan keterampilan, insentif staf dan investasi dalam permesinan atau peralatan produksi;
- Membangun taman industri besar dan pusat komersial; dan
- Mempromosikan partisipasi yang lebih aktif oleh sektor swasta dalam bidang pembangunan infrastruktur fisik.

b. Zona Ekonomi Khusus

Undang-undang tentang zona ekonomi khusus sedang disusun. Tujuannya adalah untuk membuat zona seperti itu lebih fungsional dan efektif dalam mendukung investasi dan pembangunan sosial-ekonomi di negara ini, serta memberikan kontribusi untuk pembangunan baru di wilayah tersebut.

c. Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Sebuah sub-dekrit untuk mengimplementasikan UU Konsesi sedang dipersiapkan untuk melibatkan lebih banyak peserta sektor swasta dalam pembangunan ekonomi melalui kemitraan swasta publik (“PPP”).

d. Kebijakan Pengembangan Industri

Kamboja telah secara resmi meluncurkan Kebijakan Pengembangan Industri (“IDP”) 2015-2025 pada Agustus 2015. Peluncuran ini merupakan tonggak utama dalam implementasi IDP yang diarahkan pada integrasi yang lebih dalam dengan AEC pada akhir tahun 2025. IDP membahas lima prioritas sektor industri sebagai berikut:

- Industri atau manufaktur baru dengan produk bernilai tambah tinggi, kreatif dan kompetitif yang berfokus tidak hanya pada pasar konsumen tetapi juga pada peralatan produksi;
- UKM di semua sektor, terutama yang terlibat dalam produksi obat-obatan, peralatan medis, bahan konstruksi, kemasan ekspor, furnitur dan peralatan industri;
- Produk agroindustri untuk pasar ekspor dan domestik;
- Mendukung industri untuk sektor pertanian, pariwisata dan tekstil serta industri yang menghubungkan rantai pasokan global dan regional seperti garmen, suku cadang, dan produk setengah jadi lainnya; dan
- Industri yang melayani lini produksi regional seperti teknologi informasi dan telekomunikasi, energi, industri berat, teknologi hijau dan kerajinan budaya / sejarah / tradisional.

Berdasarkan paparan konseptual diatas, penulis mencoba membuat konklusi untuk mendukung dan mengarahkan hipotesis. Beberapa asumsi yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Kegiatan investasi Tiongkok merupakan pelaksanaan strategi kebijakan pembangunan inklusif Tiongkok.
2. Kegiatan investasi Tiongkok di Kamboja orientasi industrinya bersifat masif, bertujuan untuk menguasai pangsa pasar, dan ekspansif.
3. Pemerintah Kamboja memberikan kemudahan untuk berinvestasi di Kamboja dengan melakukan revisi undang-undang investasi di Kamboja.
4. Pemertintah Kamboja juga memberikan berbagai insentif, kemudahan membayar pajak serta adanya wilayah ekonomi khusus.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian. Hipotesis diperlukan untuk mempersempit jangkauan penelitian yang berguna untuk memudahkan penulis untuk membatasi masalah yang diteliti. Secara sederhana, hipotesis membantu memfokuskan data yang tersebar tanpa arahan yang jelas. Berdasarkan pada rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, penulis menarik sebuah hipotesis yaitu sebuah kesimpulan sementara tentang hubungan beberapa variabel mengenai permasalahan yang perlu diuji kebenarannya. Adapun hipotesis yang penulis dapatkan dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

Jika kegiatan investasi yang bersifat masif serta penguasaan pangsa pasar merupakan pelaksanaan dari strategi pembangunan ekonomi inklusif Tiongkok, maka penciptaan iklim yang kondusif berupa pemberian berbagai insentif, pembebasan pajak, serta pembukaan kawasan ekonomi khusus merupakan bagian dari arah dan tindakan strategi pembangunan ekonomi di Kamboja

2.4. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Strategi pembangunan ekonomi inklusif Tiongkok.	1) Investasi yang bersifat masif	1) Investasi luar negeri memberi Tiongkok kesempatan untuk meningkatkan ekonominya sendiri, dan untuk meningkatkan kekuatan ekonominya untuk meningkatkan pengaruhnya di luar negeri. Kebijakan Beijing mendorong investasi di pasar luar negeri dan perusahaan Tiongkok telah secara aktif memperluas jejak mereka di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Sumber: https://www.globaltrademag

		.com/Tiongkok-dominate-global-investments/
	2) Industri yang menguasai pangsa pasar	<p>1) Pemerintah Tiongkok telah meluncurkan “Made in Tiongkok 2025,” sebuah kebijakan industri yang dipimpin negara yang berupaya menjadikan Tiongkok dominan dalam manufaktur teknologi tinggi global. Program ini bertujuan untuk menggunakan subsidi pemerintah, memobilisasi perusahaan milik negara, dan mengejar akuisisi kekayaan intelektual untuk mengejar—dan kemudian melampaui—kehebatan teknologi Barat di industri maju.</p> <p>Sumber: https://www.cfr.org/background/made-Tiongkok-2025-threat-global-trade</p>

<p>Variabel Terikat : Arah dan strategi pembangunan ekonomi di Kamboja</p>	<p>1) Pemberian berbagai insentif</p>	<p>1) Dalam <i>Cambodia Investment Guide</i> 2018 bagian 5 tentang <i>Investment Incentives and Procedures: Overview</i> disebutkan bahwa proyek investasi yang terkualifikasi (QIP) berhak atas insentif sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investment Incentives • Limitations • Support industry QIPs and Subcontractors • Investment Guarantees (DFDL Cambodia, 2018)
	<p>2) Pembebasan pajak</p>	<p>1) Dalam <i>Cambodia Investment Guide</i> 2018 juga disebutkan mengenai pembebasan pajak yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Income Tax Exemption • Special Depreciation • Customs Duty Exemption (DFDL Cambodia, 2018)

	<p>3) Pembukaan kawasan ekonomi khusus</p>	<p>1) Pembukaan Kawasan Ekonomi Khusus: Pemerintah Kamboja mengelola 4 SEZs yaitu Phnom Penh Special Economic Zones, Sihanoukville Special Economic Zones, Manhattan Special Economic Zones, Tai Seng Bavet Special Economic Zones.</p> <p>Sumber: https://www.healyconsultants.com/cambodia-company-registration/free-zones/</p>
--	--	--

2.5. Skema Kerangka Hipotesis



